

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sudah menerapkan konsep Good Governance dalam pemerintahannya. Menurut Mardiasmo (2006), konsep Good Governance dapat didefinisikan sebagai langkah pemerintah dalam suatu negara dalam menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk membangun masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satu unsur penting dalam suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya adalah pertanggungjawaban laporan keuangan baik pada level pemerintahan pusat maupun daerah.

Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara, semua proyeksi pengeluaran dan penerimaan untuk tahun berikutnya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan selanjutnya akan mengkoordinasikan semua rencana penerimaan negara, termasuk pendapatan dari pajak serta pendapatan non-pajak seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.

Berdasarkan Pedoman Administrasi Pengelolaan Hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017, hibah memiliki dua tujuan utama, yaitu mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional dan

memberikan dukungan dalam penanggulangan bencana alam serta bantuan kemanusiaan. Terdapat tiga bentuk hibah yang ada, yakni hibah dalam bentuk uang, hibah dalam bentuk barang/jasa, dan hibah dalam bentuk surat berharga. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki peran dalam menerbitkan MPHL-BJS. Dokumen ini diberikan sebagai tanda persetujuan yang sah untuk mencatat pendapatan, beban, dan aset yang berasal dari hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga, yang proses pencairan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. KPPN Tebing Tinggi termasuk dalam kategori KPPN Tipe A1 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 yang mengatur tentang struktur organisasi dan tugas Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tugas utama KPPN Tebing Tinggi adalah sebagai Bendahara Umum Negara yang bertanggung jawab atas penyaluran pembiayaan berdasarkan anggaran yang ada, serta mengelola pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran dari dan ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas dan fungsi KPPN adalah melakukan pencatatan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerjanya.

Pengelolaan dan pencatatan hibah mempunyai beberapa urgensi penting. Pertama, transparansi dan akuntabilitas akan didapatkan melalui pencatatan yang akurat dan terperinci serta dapat mencegah adanya penyimpangan atau penyalahgunaan hibah. Kedua, pencatatan yang baik akan membantu dalam

mengendalikan dan mengawasi penggunaan hibah. Dengan memantau secara cermat bagaimana hibah digunakan, Kementerian Keuangan dapat memastikan bahwa sumber daya yang diberikan telah digunakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemberi hibah. Ketiga, informasi yang akurat mengenai pencatatan hibah memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan penganggaran di masa mendatang. Selain itu, pencatatan hibah yang tetap memungkinkan pemerintah untuk membuat laporan yang akurat tentang penggunaan hibah kepada pemilik hibah dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan maksud dari penulisan karya tulis ini, terdapat dua inti pembahasan yang akan digali lebih dalam.

1. Apakah pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi telah sesuai dengan prosedur pengelolaan hibah?
2. Bagaimana implementasi dan penyajian laporan keuangan terkait pengelolaan hibah barang dan jasa pada Laporan Keuangan UAKPA di KPPN Tebing Tinggi?
3. Apakah terdapat kendala dalam pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai dalam penyusunan KTTA ini antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana kesesuaian proses bisnis pengelolaan hibah langsung barang dan jasa dengan prosedur pengelolaan hibah pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi.
2. Mengetahui implementasi dan penyajian laporan keuangan terkait pengelolaan hibah barang dan jasa pada Laporan Keuangan UAKPA di KPPN Tebing Tinggi.
3. Mengetahui kendala dan solusi terkait pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan karya tulis ini, ruang lingkup yang dipilih oleh penulis terbatas pada proses pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2022-2023. Peninjauan kesesuaian pengelolaan hibah langsung barang dan jasa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian karya tulis tugas akhir ini ditujukan agar dapat menghasilkan eksternalitas positif berupa manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari tulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan serta dapat menjadi pengembangan teori terkait pengelolaan hibah langsung barang dan jasa KPPN Tebing Tinggi. Pembaca dapat mengetahui kesesuaian pengelolaan hibah barang dan jasa pada KPPN Tebing Tinggi dengan peraturan yang ada. Selain

itu, pembaca dapat mengetahui kendala yang terjadi pada KPPN Tebing Tinggi terkait pengelolaan hibah barang dan jasa serta solusi apa yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebendaharaan Negara serta sebagai penambah wawasan terkait pengelolaan hibah langsung barang dan jasa terutama pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi

b) Bagi instansi, penulisan ini dapat memberikan gambaran kendala yang ada serta menjadi bahan evaluasi untuk membuat kebijakan agar dapat menghasilkan pengelolaan hibah langsung barang dan jasa yang lebih baik.

c) Bagi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, penulisan ini dapat menjadi bahan referensi melaksanakan proses pengesahan hibah lebih baik dan mengetahui bagaimana pandangan para satuan kerja terhadap pengesahan hibah langsung barang dan jasa di KPPN.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum dari penulisan karya tulis. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup permasalahan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan mempelajari teori-teori yang akan dijadikan dasar dan acuan penulisan tentang pengelolaan hibah langsung barang dan jasa. Teori-teori yang akan dijabarkan juga dijadikan sebagai bahan untuk menelaah kesesuaian pelaksanaan pengelolaan hibah serta penyajian pada laporan keuangan UAKPA dengan teori-teori yang ada.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan intisari penulisan yang menuangkan gambaran secara garis besar terkait metode pengumpulan data, objek penelitian, serta pembahasan hasil penelitian mengenai pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi. Penulis telah membuat tiga garis besar permasalahan yang akan dibahas. Ketiga hal yang akan dibahas yaitu apakah pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi telah sesuai dengan prosedur pengelolaan hibah serta bagaimana penyajiannya pada laporan keuangan UAKPA dan kendala yang terdapat pada pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi.

BAB IV SIMPULAN

Bagian akhir dari karya tulis ini berisi penjabaran dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengelolaan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi. Hasil dan kesimpulan dari karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.